



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 18 September 2020

Halaman: 2

**PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

## Kinerja 29 OPD Pemkot Perlu Perbaikan

**UMBULHARJO (MERAPD)** -Sebanyak 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Yogyakarta mendapatkan nilai reformasi birokrasi di bawah rata-rata. Hal itu berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Pemkot Yogyakarta. OPD yang memiliki nilai di bawah rata-rata itu diminta melakukan perbaikan.

"Rekapitulasi nilai PMPRB, ada OPD yang sudah menjalankan dengan baik dan yang masih kurang. Ada 29 OPD yang nilai rata-rata reformasi birokrasi di bawah nilai rata-rata," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, saat evaluasi penilaian Sakip dan Reformasi Birokrasi di Balaikota, Kamis (17/9). Sebanyak 29 OPD yang memiliki nilai reformasi birokrasi di bawah rata-rata di antaranya Kecamatan Jetis, Gondomanan, Merangsan, Kotagede, Pakualaman, Umbulharjo, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan OPD yang paling tinggi mendapatkan nilai reformasi birokrasi sebanyak 95 persen seperti Bagian Organisasi dan paling rendah 17 persen. Sisanya 22 OPD mendapatkan nilai reformasi birokrasi di atas rata-rata.

"OPD yang masih rendah nilainya otomatis jadi pemberat untuk memperbaiki diri. OPD yang masih rendah tolong dilihat kembali kapasitas kelembagaan dan birokrasi. Harapannya semua minimal bisa mengejar nilai rata-rata 73 persen atau BB," tambahnya.

Menurutnya nilai reformasi birokrasi yang rendah kebanyakan di kecamatan karena perangkat di wilayah itu kurang lantaran hanya beberapa ASN dan tenaga teknis. Oleh sebab itu Pemkot Yogyakarta dalam rotasi pejabat di dinas diarahkan ke kecamatan dan perlu menurunkan staf ke wilayah.

Di samping itu ada perbedaan yang cukup tinggi antara nilai reformasi birokrasi Pemkot Yogyakarta dan 51 OPD. Dia menyebut Pemkot Yogyakarta dalam PMPRB mencapai 87,6 persen dan capaian 51 OPD Pemkot Yogyakarta ada selisih sekitar 25 persen.

"Artinya apa yang dilakukan Pemkot Yogya, belum separohnya perangkat daerah menjalankan seperti yang harus dikerjakan. Kami minta Kepala OPD untuk lebih turun ke



**Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi OPD Pemkot Yogyakarta.**

bawah, kasi dan kasubag semua harus dalam pemantauan," papar Heroe.

Pihaknya juga menyoreti terkait wilayah bebas korupsi pada OPD yang ditunjuk yang terkesan hanya sekadar menjalankan tugas atau tidak utuh. Termasuk belum masuknya kota sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani atau tingkatan paling tinggi. Untuk itu nantinya wilayah bebas korupsi ditambah sebagai bagian menjadikan birokrasi yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Ciptakan agen-agen perubahan dalam OPD untuk mendorong terjadinya perubahan dalam organisasi agar efisien, efektif, kapabel, akuntabel dan memberikan pelayanan yang baik," ucapnya. (Tri-d

**Ig. Trihastono, S.Sos, MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005

| Instansi | Tindak Lanjut    |
|----------|------------------|
| 1. ....  | Untuk Ditanggapi |
| 2. ....  | Untuk Diketahui  |
| 3. ....  | Jumpa Pers       |
| 4. ....  | ...              |
| 5. ....  | ...              |

| Instansi             | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|----------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Organisasi | Negatif      | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 19 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos, MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005